

Formulasi Kebijakan Kolaborasi Pengelolaan Pariwisata**Oleh:****¹ Ransta L. Lekatompessy; ² Edoardus E. Maturbongs; ³ Fiqih; ⁴ Puspita Wulan
Sari**^{1,3,4}. Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Musamus². Program Studi Administrasi Publik Program Magister, Fakultas Ilmu Sosial Dan
Ilmu Politik, Universitas Musamus
Email. ransta@unmus.ac.id**Abstrak**

Formulasi Kebijakan sebagai proses merumuskan kebijakan atau strategi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Belum adanya Badan Pengelola Pengembangan Pariwisata Kabupaten yang seharusnya diatur dalam Peraturan Bupati, sehingga pemerintah diharapkan untuk segera membentuk badan pengelola pariwisata sehingga wadah tersebut bersama dengan Dinas Pariwisata senantiasa bersinergi dalam proses perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan yang berkaitan dengan pariwisata, termasuk promosi, pengembangan produk wisata, dan konservasi lingkungan dan budaya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini jenis penelitian kualitatif deskriptif, dengan teknik penumpukan data dengan observasi, wawancara mendalam (depth interview), Focus Group Discussion (FGD) dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini, yaitu Formulasi kebijakan kolaborasi pengelolaan pariwisata di Kabupaten Merauke melibatkan lima pihak, yaitu pemerintah daerah, akademisi, masyarakat, pelaku usaha pariwisata, dan media massa. Kolaborasi pentahelix ini sangat penting untuk menciptakan sinergi dan kerjasama dalam pengelolaan pariwisata yang diwadahi oleh Badan Pengelola Pariwisata Kabupaten, terbentuknya badan pengelola pariwisata maka pengembangan pariwisata dapat lebih terarah dan terintegrasi, sehingga dapat mengoptimalkan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan yang dihasilkan.

Kata Kunci: Formulasi Kebijakan; Pengelolaan Pariwisata**Abstract**

Policy Formulation is a process of formulating policies or strategies to achieve the desired goals. There is no Regency Tourism Development Management Agency that should be regulated in the Regent's Regulation, so the government is expected to immediately form a tourism management body so that the forum together with the Tourism Office always synergizes in the process of planning, organizing, supervising, and controlling activities related to tourism, including promotion, development of tourism products, and conservation environment and culture. The method used in this research is descriptive qualitative research, with data collection techniques by observation, in-depth interviews (depth interview), Focus Group Discussion (FGD), and documentation study. The results of this study, namely the formulation of collaborative tourism management policies in Merauke Regency involve five parties, namely local government, academics, communities, tourism business actors, and the mass media. The Pentahelix collaboration is very important to create synergy and cooperation in tourism management which is accommodated by the Regency Tourism Management Board, the formation of a tourism management body will allow tourism development to be more directed and integrated, to optimize the resulting economic, social, and environmental benefits.

Keywords: Policy Formulation; Tourism Management

PENDAHULUAN

Pariwisata adalah salah satu sektor ekonomi dunia yang terbesar dan paling cepat berkembang. Pariwisata dapat menjadi sumber devisa bagi negara, khususnya bagi pemerintah daerah. Selama tahun terakhir, pariwisata telah menjadi kendaraan utama untuk pertumbuhan, pembangunan, dan penciptaan lapangan kerja. Pariwisata adalah potensi yang dimiliki setiap daerah berupa wisata alam, wisata budaya, wisata buatan, dan lain-lain. Hal ini menunjukkan bahwa setiap daerah memiliki potensi wisata yang dapat digali, dimanfaatkan, dikelola dan dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan sarana rekreasi. Kabupaten Merauke memiliki 73 (tujuh puluh tiga daya tarik Wisata), yang tersebar pada 6 (enam) Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK), yaitu: KPPK Perkotaan dan sekitarnya; KPPK Wasur dan sekitarnya; KPPK Semangga dan sekitarnya; KPPK Okaba dan sekitarnya; KPPK Dolak dan sekitarnya; KPPK Muting dan sekitarnya. Pengelolaan daya tarik wisata yang banyak melibatkan berbagai strategi dan teknik yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas dan jumlah kunjungan wisatawan.

Banyaknya daya tarik wisata yang masih belum diketahui masyarakat luas juga menjadi tantangan bagi pemerintah untuk memperkenalkan secara luas. Tingkat dukungan yang masih minim menjadi kendala bagi pemerintah untuk mengenalkan wisata lokal ke luar negeri, terutama fasilitas wisata di daerah terpencil jauh dari ibu kota dan kota besar lainnya di Indonesia (Ali et al., 2018). Pengelolaan pariwisata tidak hanya menjadi peran Dinas Pariwisata sebagai organisasi perangkat daerah teknis yang membidangi kepariwisataan, namun dipandang perlu membentuk badan pengelola pariwisata daerah. Pembentukan badan pengelola pariwisata daerah, tentu saja memerlukan formulasi kebijakan yang bertujuan merumuskan secara mendalam, terkait tugas, peran dan ketentuan lainnya tentang badan pengelola pariwisata. Formulasi kebijakan adalah proses merumuskan kebijakan atau strategi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam konteks pemerintahan, formulasi kebijakan melibatkan proses penentuan kebijakan atau keputusan oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah atau isu yang dihadapi oleh masyarakat atau negara.

Perspektif tata kelola kolaborasi telah banyak digunakan untuk memecahkan masalah lokal di daerah karena adanya keterbatasan pemerintah lokal dalam menjalankan pemerintahan di daerahnya dengan collaborative governance yang merupakan proses yang banyak melibatkan aktor kebijakan agar terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Collaborative Governance dengan tujuan untuk memecahkan permasalahan (Surya et al., 2021).

Formulasi Kebijakan Kolaborasi Pemerintah untuk Mengembangkan Potensi Pariwisata Kabupaten Merauke merupakan strategi yang tepat untuk mengakomodir peran banyak pemangku kepentingan dan percepatan pembangunan pariwisata di Kabupaten Merauke. Hal ini sebenarnya sudah tertuang dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten (RIPPARKAB) Merauke 2018-2032 Pasal

62, yang menyebutkan tentang pembentukan Badan Pemerintahan Pembangunan Pariwisata yang unsur-unsurnya adalah a) pemerintah daerah; b) masyarakat dan/atau lembaga swadaya masyarakat; c) lembaga pendidikan (pendidikan tinggi dan pendidikan formal); dan (d) industri. Pembentukan badan pengembangan pariwisata daerah akan tetap diatur dengan Keputusan Bupati. Belum ada kebijakan yang mengatur kerjasama tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian terhadap formulasi kebijakan kolaborasi pengelolaan pariwisata di Kabupaten Merauke (*Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Merauke Tahun 2018-2032*, n.d.).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Strategi pendekatan jenis kualitatif digunakan untuk menjawab fenomena. Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam (*depth interview*), *Focus Group Discussion* (FGD) dan studi dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan dengan melibatkan akademisi Universitas Musamus, Dinas Pariwisata Kabupaten Merauke, DPRD Kabupaten Merauke, Dunia Usaha di sektor Pariwisata, dan tokoh masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode analisis, secara umum mencakup analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan analisis dari Miles dan Huberman berupa analisis interaktif, dimana data yang ada dianalisis secara bersama-sama, yaitu reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles, M. B. , & Saldana, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemanfaatan industri pariwisata dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat dan pemerintah, seperti menciptakan lapangan kerja baru, mengentaskan kemiskinan, dan meningkatkan pendapatan bagi pemerintah daerah dan masyarakat. Langkah konkrit yang dilakukan adalah pengembangan pariwisata berkelanjutan berbasis masyarakat yaitu memanfaatkan berbagai destinasi wisata yang belum dikelola untuk menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat di sekitar destinasi wisata (Ringa, 2023). Kajian pengelolaan pariwisata ini, akan dibahas lebih lanjut dengan mengkaji formulasi kebijakan kolaborasi pariwisata dan pengelolaan pariwisata di Kabupaten Merauke.

Formulasi Kebijakan Kolaborasi Pariwisata

Proses perumusan kebijakan publik terdapat aktor-aktor kebijakan yang oleh James Anderson serta James P. Lester dan Joseph Stewart membagi aktor kebijakan atau pemeran tersebut menjadi aktor atau pemeran resmi dan aktor atau pemeran aktor kebijakan tidak resmi (Winarno, 2014:126), kedua aktor tersebut antara lain: Aktor resmi: Agen-agen pemerintah/birokrasi (Eksekutif/Presiden; Legislatif; Yudikatif) dan Aktor tidak resmi (Kelompok kepentingan, Partai politik, Individu).

Formulasi kebijakan publik peran aktor tidak resmi selain pemerintah tidak dapat dikesampingkan, James Anderson menyebut bahwa formulasi kebijakan sebagai upaya bagaimana mengembangkan sejumlah pilihan atau alternatif guna memecahkan

masalah dan siapa saja yang ikut terlibat dalam proses formulasi kebijakan tersebut (Subarsono, 2009:12-13). Don K. Price menyebut bahwa proses pembuatan kebijakan merupakan interaksi diantara ilmuwan, pemimpin kelompok profesional, administrator dan politisi (Wahab, 2011:48), pandangan lain menurut Lindblom bahwa sejatinya proses perumusan kebijakan publik fokus utamanya adalah aktor, kepentingan dan adanya interaksi diantara para aktor (Kusumanegara, 2010:85). Beberapa pandangan ini memberikan gambaran dalam proses formulasi kebijakan atau perumusan kebijakan atau pembuatan kebijakan hendaknya pemerintah mengajak duduk bersama sejumlah kelompok maupun individu yang menguasai atau memahami permasalahan yang ada dengan tujuan menawarkan sejumlah alternatif atau solusi kebijakan.

Pandangan di atas memberikan pemahaman bahwa dalam mengidentifikasi persoalan-persoalan dalam masyarakat dibutuhkan pula peran aktor tidak resmi dalam merumuskan nilai-nilai yang dianggap penting untuk dimasukkan sebagai rumusan kebijakan. Peran aktor tidak resmi disini biasanya berupa masukan atau pandangan atau persepsi terkait dengan pemahaman terhadap sejumlah permasalahan yang terjadi disekitarnya, pemerintah sendiri tentu mempunyai keterbatasan informasi dan pemahaman terhadap karakteristik lingkungan kebijakan maka peran berbagai aktor tidak resmi dalam memberikan masukan-masukan terhadap perumusan kebijakan sangat dibutuhkan. Penting diketahui bahwa guna menuju pada perumusan kebijakan yang baik dan tepat sasaran, maka masalah-masalah yang hendak dirumuskan menjadi sebuah kebijakan hendaknya berasal dari lingkungan kebijakan yang muncul akibat isu-isu kebijakan.

Tata kelola kolaborasi adalah serangkaian pengaturan di mana satu atau lebih lembaga publik terlibat langsung dalam proses pembuatan kebijakan formal yang berorientasi pada konsensus yang bertujuan untuk membuat kebijakan bersama untuk mencapai kemajuan bersama (Setyaningrum et al., 2022). Pemerintah tidak dapat berdiri sendiri untuk mengembangkan kepariwisataan sebab pengelolaan kebijakan kepariwisataan semua komponen terlibat didalamnya antara lain masyarakat sebagai pemilik ulayat, pihak swasta sebagai pemilik modal, masyarakat sebagai pengguna dan tentu saja pemerintah dalam hal regulasi sehingga dibutuhkan kolaborasi diantara semua elemen agar kebijakan yang dirumuskan dan dihasilkan kelak akan benar-benar terimplementasikan dengan baik, disinilah peran formulasi kebijakan dibutuhkan yang menurut Kraft dan Furlong bahwa formulasi kebijakan merupakan desain dan penyusunan rancangan tujuan kebijakan serta strategi untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut (Hamdi, 2014:87). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa proses formulasi kebijakan publik merupakan tahapan yang sangat penting untuk melahirkan sebuah kebijakan yang baik dan mampu menjawab tuntutan publik sehingga dapat pula menyelesaikan berbagai persoalan yang ada.

Proses formulasi kebijakan dapat melibatkan berbagai tahapan, seperti identifikasi masalah, pengumpulan data dan informasi, analisis kebijakan, pengembangan alternatif kebijakan, hingga penetapan kebijakan yang akan

diimplementasikan. Mengadopsi pemikiran Winarno (2014), bahwa formulasi kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan dalam upaya merumuskan pengelolaan pariwisata yang dilakukan oleh para aktor. Formulasi kebijakan kolaborasi pengelolaan pariwisata di Kabupaten Merauke melibatkan lima pihak, yaitu pemerintah daerah, akademisi, masyarakat, pelaku usaha pariwisata, dan media massa. Kolaborasi pentahelix ini sangat penting untuk menciptakan sinergi dan kerjasama dalam pengelolaan pariwisata di Kabupaten Merauke. Pembangunan kepariwisataan harus didasarkan pada kebutuhan obyektif daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan industri pariwisata diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja baru di daerah, menarik lebih banyak tenaga kerja, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan berdampak positif bagi perkembangan ekonomi daerah.

Pengelolaan Pariwisata Di Kabupaten Merauke

Kabupaten Merauke memiliki keunikan, keindahan serta keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang merupakan tujuan kunjungan wisata, dengan jumlah daya tarik wisata terbanyak ada di KPPK Perkotaan dan sekitarnya dan paling sedikit adalah pada KPPK Muting dan sekitarnya, seperti pada grafik jumlah Daya Tarik Wisata Kabupaten (DTWK) Merauke. Tentu saja masih banyak daya Tarik wisata lainnya, namun belum dieksplor maksimal hal tersebut dikarenakan permasalahan aksesibilitas terhadap lokasi yang sulit dijangkau.



Sumber : RIPPARKAB, 2019

Jumlah Daya tarik wisata yang terbilang banyak, tentunya diperlukan pengelolaan pariwisata yang terencana dan terorganisir dengan baik. Pengelolaan pariwisata adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan yang berkaitan dengan pariwisata, termasuk promosi, pengembangan produk wisata, dan konservasi lingkungan dan budaya. Peran Dinas Pariwisata Kabupaten Merauke sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membidangi urusan kepariwisataan, memiliki 3 (tiga) bidang dalam struktur organisasinya, yaitu Bidang Destinasi Pariwisata, Bidang Promosi dan Pemasaran

Pariwisata, dan Bidang Ekonomi Kreatif. Selanjutnya dalam pengembangan kepariwisataan, Dinas Pariwisata senantiasa berupaya melakukan berbagai strategi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Pariwisata. Strategi dan Kebijakan OPD, sebagai upaya mencapai sasaran pembangunan bidang pariwisata, difokuskan pada 3 (tiga) bidang penting, yaitu:

1. Mendorong terciptanya iklim yang kondusif bagi pembangunan kepariwisataan yang berorientasi kepada peningkatan ekonomi masyarakat;
2. Meningkatkan efektivitas peran sebagai regulator dan fasilitator dalam pembangunan dan pemasaran kepariwisataan;
3. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan memantapkan manajemen pembangunan bidang kepariwisataan (*Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pariwisata Kabupaten Merauke Tahun 2021, 2021*).

Hasil pengukuran capaian perjanjian kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Merauke di tahun 2021 yang hanya mencapai 46,15% yaitu termasuk kategori “kurang berhasil” dalam penyelenggaraan pemerintahan (*Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pariwisata Kabupaten Merauke Tahun 2021, 2021*). Pencapaian kinerja yang ditargetkan pada Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Merauke tahun 2016-2021 melalui 1(satu) sasaran strategis, yaitu Meningkatkan Pemanfaatan Objek Wisata potensial sebagai tujuan destinasi Wisata dan 13 (tiga belas) indikator kinerja, yang terdiri dari:

- 1) Perencanaan dan Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK) Berbasis Religi, Budaya dan Alam;
- 2) Perencanaan, Penetapan dan Fasilitasi Pembangunan Daya Tarik Wisata Kabupaten (DTWK) Berbasis Religi, Budaya dan Alam;
- 3) Pembentukan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Berbasis Religi, Budaya dan Alam;
- 4) Pengembangan Desa Wisata Berbasis Religi, Budaya dan Alam Berbasis Religi, Budaya dan Alam;
- 5) Pembentukan UMKM Pariwisata Berbasis Religi, Budaya dan Alam (Cinderamata misalnya Batik, dan Gerabah Kuliner, serta Kesenian);
- 6) Jumlah wisatawan nusantara berbasis Religi, Budaya dan Alam;
- 7) Jumlah Wisatawan Mancanegara Berbasis Religi, Budaya dan Alam;
- 8) Branding Pariwisata Merauke Berbasis Religi, Budaya dan Alam;
- 9) Kegiatan Promosi Pariwisata Di Dalam Dan Luar Negeri Berbasis Religi, Budaya dan Alam;
- 10) Jumlah usaha pariwisata yang ter-TDUP (Tanda Daftar Usaha) berbasis Religi, Budaya dan Alam;
- 11) Lama Tinggal Wisatawan Mancanegara berbasis Religi, Budaya dan Alam;
- 12) Lama Tinggal Wisatawan Nusantara berbasis Religi, Budaya dan Alam;
- 13) Koordinasi/Kesepahaman/ fasilitasi/ kebijakan kemitraan usaha pariwisata berbasis Religi, Budaya dan Alam (*Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi*

Pemerintah (LAKIP) Dinas Pariwisata Kabupaten Merauke Tahun 2021, 2021).

Ketidaktercapaian kinerja secara maksimal tentunya tidak terlepas dari berbagai Hambatan dan kendala yang dihadapi Dinas Pariwisata selaku pelaksana teknis kebijakan kepariwisataan, yaitu :

- a. Adanya pandemi Covid-19 yang melanda Dunia dan khususnya di Indonesia sehingga berimbas pada kunjungan wisatawan ke Kabupaten Merauke .
- b. Masih rendahnya partisipasi masyarakat terhadap pembangunan pariwisata di Kabupaten Merauke.
- c. Sumber Daya Manusia di bidang pariwisata yang belum memadai.
- d. Masih terbatasnya upaya pembangunan sarana dan prasarana pendukung wisata di Kabupaten Merauke.
- e. Masih terbatasnya informasi terkait objek dan daya tarik wisata yang ada di Kabupaten Merauke.

Pengelolaan pariwisata tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Pariwisata semata namun, kolaborasi antar berbagai aktor yang terlibat merupakan kunci keberhasilan. Kolaborasi yaitu suatu kegiatan yang secara fundamental terletak pada pengelolaan jaringan sosial. Jaringan sosial yakni hubungan simpul-simpul komunikasi para pemangku kepentingan. Atas pemahaman tersebut dapat disimpulkan bahwa teori kolaborasi yakni analisis dari proses tata kelola dengan sudut pandang pada jaringan sosial. Model tata kelola kolaboratif mengharuskan seluruh pemangku kepentingan terlibat dalam dialog, dimana para pemangku kepentingan ini mewakili diri mereka sendiri dalam mengungkapkan kepentingannya (Booher, 2004).

Belum adanya Badan Pengelolaan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (BPPPK) yang seharusnya diatur dalam Peraturan Bupati, menjadi hal yang dikeluhkan oleh perwakilan pengusaha bidang pariwisata di Kabupaten Merauke “sudah sepatutnya BPPPK Merauke dibentuk dengan tetap merujuk pada Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan, yang didalamnya termuat tentang Organisasi Manajemen Destinasi, forum ini disesuaikan dengan ukuran dan skala destinasi yang terdiri dari 5 (lima) unsur pemangku kepentingan (penta helix) , yang terdiri dari : Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, swasta, masyarakat, dan akademisi”.

Pemerintah daerah harus menjadi inisiator dalam pembentukan kolaborasi pentahelix, dengan mengambil peran sebagai regulator dan fasilitator. Pemerintah daerah perlu mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mendukung pengembangan pariwisata di Kabupaten Merauke, seperti kebijakan pemberian insentif untuk pelaku usaha pariwisata, kebijakan pembangunan infrastruktur yang mendukung pariwisata, dan kebijakan pengembangan SDM di bidang pariwisata. Selain itu, pemerintah daerah juga perlu memfasilitasi pertemuan-pertemuan antara kelima pihak yang

terlibat dalam kolaborasi pentahelix ini, sehingga tercipta sinergi dan koordinasi yang baik.

Akademisi memiliki peran penting dalam kolaborasi pentahelix ini, dengan memberikan saran dan masukan mengenai pengembangan pariwisata di Kabupaten Merauke berdasarkan hasil penelitian dan pengalaman yang dimiliki. Masyarakat senantiasa dilibatkan dalam pengelolaan pariwisata, dengan memberikan masukan dan dukungan dalam pengembangan pariwisata. Pelaku usaha pariwisata juga harus dilibatkan, dengan memberikan kontribusi dan masukan dalam pengembangan pariwisata, serta memperhatikan aspek keberlanjutan dalam usaha mereka. Media memiliki peran penting dalam kolaborasi pentahelix ini, dengan menjadi media informasi dan promosi pariwisata Kabupaten Merauke. Media perlu memberikan informasi yang akurat dan mendukung pengembangan pariwisata, serta berperan dalam promosi pariwisata di Kabupaten Merauke.

Badan Pengelola Pariwisata Kabupaten (BPPK) adalah sebuah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk mengelola dan mengembangkan pariwisata di daerah tersebut. Badan ini bertanggung jawab untuk merencanakan, mengkoordinasikan, mengimplementasikan, dan mengawasi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan pariwisata, seperti promosi pariwisata, pengembangan produk pariwisata, dan pengelolaan destinasi pariwisata.

Tugas dan fungsi BPPK meliputi: Merumuskan kebijakan dan strategi pengembangan pariwisata di daerah; Meningkatkan kualitas dan kuantitas produk pariwisata yang ada di daerah; Meningkatkan fasilitas dan infrastruktur pariwisata, seperti jalan, bandara, hotel, restoran, dan fasilitas publik lainnya; Meningkatkan promosi pariwisata, baik secara nasional maupun internasional; Mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan pariwisata yang dilakukan oleh pelaku pariwisata, seperti agen perjalanan, hotel, restoran, dan tempat wisata; Mengoptimalkan partisipasi masyarakat lokal dalam pengembangan pariwisata; dan Menjaga kelestarian dan konservasi lingkungan serta kearifan lokal yang ada di destinasi pariwisata.

Pembentukan badan pengelola pariwisata Kabupaten (BPPK) adalah merujuk pada konsep pengembangan pariwisata berkelanjutan. Konsep pariwisata berkelanjutan menekankan pentingnya mengembangkan pariwisata yang dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan yang seimbang. Hal ini berarti bahwa pengembangan pariwisata harus memperhatikan dampak sosial dan lingkungan serta kepentingan masyarakat lokal. Urgensi Pembentukan BPPK dalam mencapai tujuan pengembangan pariwisata berkelanjutan, karena badan tersebut dapat bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan berbagai pihak yang terkait dalam pengembangan pariwisata. Dengan adanya BPPK, pengembangan pariwisata dapat lebih terarah dan terintegrasi, sehingga dapat mengoptimalkan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan yang dihasilkan.

KESIMPULAN

Formulasi kebijakan kolaborasi pengelolaan pariwisata di Kabupaten Merauke didasarkan pada kerjasama antara pemerintah, masyarakat lokal, akademisi, pengusaha pariwisata, serta peran media massa. Kolaborasi berbagai aktor yang terlibat dalam kepariwisataan hendaknya diwadahi oleh Badan Pengelola Pariwisata Kabupaten sebagaimana telah diamanatkan dalam RIPARKAB Merauke.

Sebagai saran dalam pengelolaan pariwisata yakni, pembentukan badan pengelola pariwisata kabupaten harus segera dibentuk, sehingga Ketercapaian konsep pariwisata berkelanjutan dengan penekanan pada pentingnya mengembangkan pariwisata yang dapat memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan yang seimbang, yaitu: Pengembangan infrastruktur pariwisata seperti bandara, pelabuhan, jalan raya, dan tempat parkir, tentunya akan memudahkan wisatawan untuk berkunjung; Promosi pariwisata secara aktif untuk menarik minat wisatawan. Ini dapat dilakukan melalui media sosial, brosur, video promosi, dan acara promosi; Pelatihan dan pengembangan keterampilan kepada masyarakat lokal dalam bidang pariwisata, sehingga membentuk masyarakat menjadi lebih terampil dalam menyediakan layanan pariwisata yang berkualitas; Konservasi lingkungan dan budaya dengan membangun sinergitas untuk melestarikan lingkungan dan budaya setempat; Pengawasan dan pengendalian kualitas untuk memastikan layanan pariwisata yang diberikan oleh pengusaha pariwisata dan masyarakat lokal memenuhi standar yang ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA:

- Ali, M., Amil, A., & Zulhadi, Z. (2018). Implementasi Kebijakan Collaborative Governance Dalam Tata Kelola Kawasan Pariwisata Pada Badan Promosi Daerah Kabupaten Lombok Utara. *Jurnal Ulul Albab*, 22(2), 6–12. <https://doi.org/10.31764/jua.v22i1.579>
- Booher, D. (2004). Collaborative Governance Practices and Democracy. *National Civic Review*, 93,4, 32–46., Booher, D.
- Hamdi, M. (2014). *Kebijakan Publik Proses, Analisis, dan Partisipasi*. Ghalia Indonesia.
- Kusumanegara, S. (2010). *Model dan Aktor Dalam Proses Kebijakan Publik*. Gava Media.
- Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pariwisata Kabupaten Merauke Tahun 2021*. (2021).
- Miles, M. B. ., & Saldana, M. H. (2014). *Qualitative data analysis: a methods sourcebook*. Arizona State University.
- Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Merauke Tahun 2018-2032*. (n.d.).
- Ringa, M. B. (2023). *Collaborative Governance Strategy in Sustainable Tourism Development*. 4(1).

- Setyaningrum, L. Z., Rahmanto, A. N., & Suparno, B. A. (2022). Komunikasi Pariwisata Dalam Pengembangan Destinasi Wisata Di “Nepal Van Java” Dusun Butuh, Kabupaten Magelang. *Seminar Nasional Pariwisata Dan Kewirausahaan (SNPK)*, 1, 94–103. <https://doi.org/10.36441/snpk.vol1.2022.21>
- Subarsono. (2009). *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar.
- Surya, I., Nofrima, S., Saputra, H. A., & Nurmiyati, N. (2021). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Wisata Berkelanjutan di Kabupaten Kulon Progo (Studi Kasus: Wisata Kebun Teh Nglinggo). *Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 6(2), 190–199.
- Wahab, S. A. (2011). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. UMM Press.
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik. Teori, Proses, dan Studi Kasus*. CAPS (Center of Academic Publishing Service).